

BAB I

PENDAHULUAN

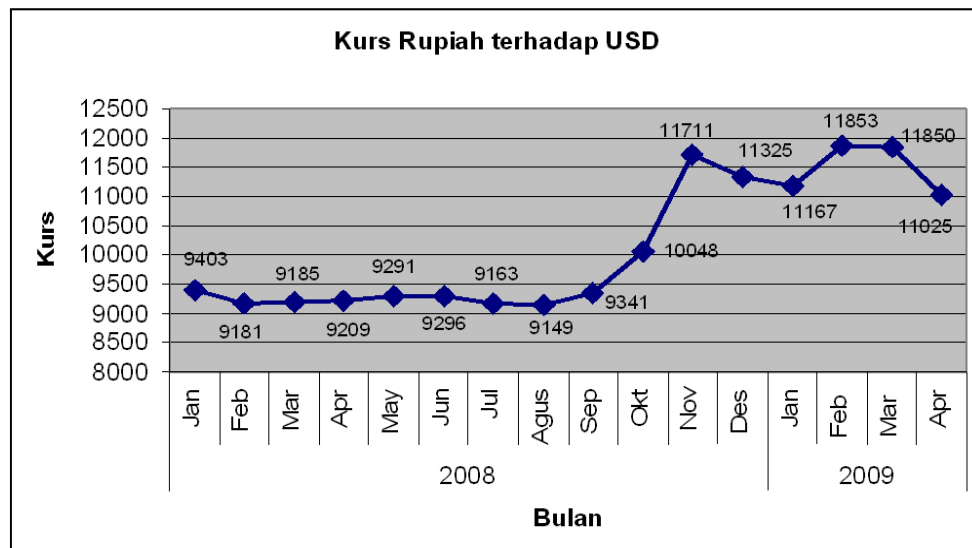
A. Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika dan kawasan Eropa pada tahun 2008 mengindikasikan akan kegagalan ekonomi kapitalisme. Sistem kapitalisme gagal menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial di negara-negara yang menganutnya. Terjadinya krisis bermula dari kasus *subprime mortgage* yang terjadi di Amerika Serikat. *Subprime mortgage* merupakan instrument kredit untuk sektor properti. AS sudah sejak lama memiliki perundang-undangan yang mengatur tentang *mortgage*. Undang-undang *mortgage* ini berisikan tentang peraturan yang berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit pemilikan rumah.

Semua warga AS jika memenuhi persyaratan tertentu bisa mendapatkan kemudahan kredit kepemilikan properti, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Namun, kemudahan pemberian kredit dan kegairahan pasar properti di AS, menyebabkan spekulasi di sektor ini terus meningkat (Depkominfo, 2008: 4). Kesalahan terbesarnya adalah pemberian *subprime mortgage* diberikan ke penduduk yang tidak layak mendapatkan kredit perumahan tersebut. Tidak layak di sini yaitu, tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab kreditnya. Hal ini memicu terjadinya kredit macet yang menyebabkan kolapsnya perusahaan-perusahaan besar di AS.

Gejolak krisis keuangan 2008 sempat memberikan sentiment buruk pada perekonomian Indonesia. Melemahnya daya beli masyarakat AS akibat dari krisis menyebabkan penurunan permintaan impor dari Indonesia. Dengan demikian ekspor Indonesia pun menurun. Hal ini menyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) menduduki posisi defisit. Krisis juga menyebabkan tekanan pada nilai tukar rupiah (lihat Grafik 1.1).

Grafik 1.1



Sumber: www.bi.go.id yang diolah

Secara umum, nilai tukar rupiah bergerak relatif stabil sampai pertengahan September 2008. Hal ini disebabkan oleh kinerja transaksi berjalan yang masih mencatat surplus serta kebijakan ekonomi yang berhati-hati. Namun sejak pertengahan September 2008, krisis global yang semakin dalam telah memberikan efek depresiasi terhadap mata uang. Kurs rupiah melemah menjadi Rp. 11.711,-/USD. Tidak sampai di situ saja, krisis juga menyebabkan tingginya laju inflasi. Tingginya tingkat inflasi disebabkan oleh naiknya harga minyak

dunia yang mendorong dikeluarkannya kebijakan subsidi harga Bahan Baku Minyak (lihat Grafik I.II).

Grafik 1.2



Sumber: www.bi.go.id yang diolah

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terjadi tekanan inflasi yang tinggi hingga triwulan III-2008, yakni 8,17% hingga bulan September 2008, yakni 12,14%. Setelah bulan September tekanan inflasi mulai menurun (Setneg, 2008). Gejolak krisis tidak sampai di situ saja, dampak dari krisis keuangan juga dirasakan oleh sektor perbankan di Indonesia sebagai pelaku dari kebijakan moneter.

Pasca krisis 2008 perbankan tidak henti-hentinya melakukan perbaikan pada kinerjanya. Perbaikan kinerja perbankan tidak lepas dari peran Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap bank agar tercipta kondisi perbankan yang sehat, mandiri, dan efisien.

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, mendefinisikan bank

sebagai berikut, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan menghimpun dana serta menyalurkan kembali dana yang telah terhimpun ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank khususnya bank konvensional menggunakan sistem bunga. Bunga bank mempunyai hubungan yang erat dengan naik turunnya inflasi. Jika inflasi naik maka Bank Indonesia (BI) akan menaikkan tingkat suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi, begitu juga sebaliknya. Sedangkan laju inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara-negara lainnya khususnya negara maju.

Tingginya suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kemampuan usaha sektor produksi. Menurut Ali (2008), hal ini berbeda sekali dengan perbankan syariah yang tidak ikut merasakan dampak dari krisis tersebut. Hal ini disebabkan oleh bank syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah, dengan kata lain perbankan syariah dianggap kebal terhadap krisis keuangan yang terjadi.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 (pasal 1, angka 1) menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 disebutkan Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Pengakuan secara yuridis memberi peluang kepada perbankan syariah untuk tumbuh dan berkembang secara luas. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada perbankan konvensional untuk mengkonversi dirinya ke dalam perbankan syariah.

Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang kemudian menghasilkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia yang kemudian lahirlah Bank Muamalat Indonesia sebagai bentuk kerja tim tersebut.

Menurut Antonio (2011), pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian,

lahirlah Bank Syariah Mandiri (konversi dari Bank Susila Bakti) serta UUS Bank IFI. Di keluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank yang menyebabkan terjadinya *unorganic growth* serta disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, data oktober 2011 mencatat telah ada 11 BUS dan 23 UUS.

Perbankan syariah di Indonesia berkembang secara baik, hal tersebut dapat dilihat dari kinerjanya yang signifikan. Pada umumnya permodalan perbankan syariah dapat dijaga dalam kisaran yang memadai untuk dapat menyerap potensi kerugian. Rasio kecukupan modal BUS dan UUS pada posisi oktober 2011 tercatat sebesar 15,30%, sedangkan untuk penyaluran dana perbankan syariah meningkat tinggi sebesar 46,43% dari Rp 83,81 triliun menjadi Rp 122,73 triliun. Peningkatan pembiayaan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga kisaran *Non Performing Financing* (NPF) dapat dijaga dalam kisaran yang stabil.

Secara rerata, NPF *gross* menurun dari 3,95% (Sept'2010) menjadi 3,11%. Hal tersebut telah mendorong perolehan laba yang cukup baik dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat pemodal. Tingkat rentabilitas perbankan syariah terhadap penggunaan assetnya cukup baik yang tercermin dari rasio ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 1,75% dan 17,43%. Jumlah pembiayaan yang meningkat diiringi dengan membaiknya kinerja telah mampu menurunkan rasio BOPO menjadi 78,03%

yang pada September tahun sebelumnya masih sebesar 79,10% (Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012).

Bank Syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Dalam tumbuh kembang perbankan syariah, tidak lepas dari peran BI dan Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang terus-menerus melakukan pengkajian, peningkatan kapasitas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), saling tukar menukar informasi dan jasa konsultasi serta koordinasi dalam rangka penetapan fatwa yang akan dijadikan landasan bagi implementasi produk, jasa dan transaksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perbankan syariah (Bank Indonesia, 2012).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana *“Analisis Mengukur Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia “(Studi Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2012).*

B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia (Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2012) serta cara mengklasifikasikan perbankan syariah yang berkinerja tidak efisien berdasarkan skor yang didapat dari pengukuran dengan menggunakan DEA ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efisiensi perbankan syariah (Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia periode 2009-2012) di Indonesia dengan menggunakan variabel-variabel *input-output* yang sesuai dengan teori ekonomi serta mengklasifikasikan perbankan syariah yang berkinerja tidak efisien berdasarkan skor yang didapat dari pengukuran dengan menggunakan metode DEA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bank Indonesia (BI), diharapkan dapat memberikan informasi kinerja perbankan syariah sebagai dasar dalam membuat kebijakan yang menyangkut dengan perbankan syariah di Indonesia.

2. Bank Syariah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja perbankan syariah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam peningkatan kinerja perbankan syariah.
3. Peneliti yang ingin meneliti tingkat efisiensi perbankan syariah selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil tiga Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sebagai objek penelitian, yaitu Bank Muammalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah periode 2009-2012. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu sumber data diambil dari variabel *input-output* dalam neraca dan laba/rugi laporan keuangan masing-masing bank syariah yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai institusi sentral yang mempublikasikan seluruh data keuangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan nonparametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA).

DEA adalah sebuah metode nonparametrik yang menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio *output* dan *input* untuk semua unit atau *Decision Making Unit* (DMU) yang dibandingkan. DEA pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper. Dan Rhodes pada tahun 1978. Metode ini tidak memerlukan sebuah fungsi persamaan dan hasil perhitungannya relatif (Siswadi dan Arafat, 2004).

Suatu DMU akan disebut efisien apabila *output* yang dihasilkan telah mencapai titik maksimal dari input tertentu, sehingga ukuran efisiensi relatif yang biasanya digunakan adalah:

$$efisiensi = \frac{jumlah\ tertimbang\ dari\ output}{jumlah\ tertimbang\ dari\ input}$$

Variabel *input* dan *output* yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Spesifikasi *Input* dan *Output* Pendekatan Intermediasi

Variabel Input	Sumber Data
Total Simpanan (X_1)	Neraca
Total Asset (X_2)	Neraca
Beban Tenaga Kerja (X_3)	Rugi/Laba
Variabel Output	Sumber Data
Pembiayaan (Y_1)	Neraca
Pendapatan Operasional Lainnya (Y_2)	Rugi/Laba

Sumber: hasil olah data variabel input-output

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian Deskriptif adalah merupakan suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif, walaupun jenis penelitian ini juga digunakan dalam penelitian ilmu eksakta (Soejono dan Abdurrahman, 1999: 19).

Kualitatif deskriptif, karena pada penelitian ini diperlukan penjelasan, gambaran dari fakta-fakta yang ada pada obyek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kajian pustaka dalam mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang gambaran perbankan secara umum, gambaran umum perbankan syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kinerja, menjelaskan tentang konsep efisiensi pengukuran *Data Envelopment Analysis* dalam perspektif Ekonomi Islam, hipotesis serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah input dan output, pembahasan dan metode analisisnya yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rumus DEA.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penghitungan data-data penelitian yang akan diketahui hasilnya, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penghitungan dari data-data penelitian dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA